

**MITIGASI BENCANA DALAM MENGATASI KEKERINGAN DI KALURAHAN  
GAYAMHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Desifa Ramdani Minhar, Faizal Aco**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta  
*Korespondensi penulis: Desifaramdani@gmail.com, faizalaco20@gmail.com*

**Abstrak**

Kalurahan Gayamharjo merupakan wilayah yang terletak di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Gayamharjo setiap musim kemarau mengalami kekeringan. Kekeringan yang terjadi di Kalurahan Gayamharjo sudah turun temurun sejak zaman Belanda. Kemarau yang terjadi berdampak kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih di Kalurahan Gayamharjo, sehingga kebutuhan air bersih di masyarakat tidak terpenuhi, padahal air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup. Para pemangku kepentingan terus melakukan berbagai cara untuk mengatasi kekeringan di Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi secara langsung, wawancara yang mendalam dengan informan menggunakan teknik snowball sampling dalam menentukan informan, dan dokumentasi berupa foto, tulisan atau grafik yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi, kebijakan dan bentuk program yang didapatkan dari pemerintah dalam mengatasi kekeringan di Kalurahan Gayamharjo berbeda-beda pada setiap wilayah atau dusun yang terdapat di Kalurahan Gayamharjo. Strategi yang digunakan yaitu pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan Pendidikan, serta peringatan dini. Bentuk mitigasi bencana yang dilaksanakan di Kalurahan Gayamharjo saat ini yaitu drooping air menggunakan tangki, memanfaatkan sumber mata air, reboisasi, sumur bor, bak penampungan air, PAMSIMAS, dan PDAM.

*Kata Kunci: Kekeringan, Mitigasi, Kebijakan*

## ***Abstract***

*Gayamharjo Village is an area located in Prambanan District, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region Province. Every dry season, Gayamharjo Village experiences drought. The drought that occurred in Gayamharjo Village has been hereditary since the Dutch era. The drought that occurs has the impact of drought which causes a clean water in the community is not fulfilled, even though water is a very vital need for living things. Stakeholders continue to do various ways to overcome drought in Gayamharjo Village, Prambanan District, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region Province.*

*The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used by researchers are direct observation, in depth interviews with informants using snowball sampling techniques in determining informants, and documentation in the form of photos, writings or graphics related to this research.*

*The results showed that the strategies, policies and forms of programs obtained from the government in overcoming drought in Gayamharjo Village were different in each region or hamlet located in the Gayamharjo Village. The strategies used are mapping, monitoring, information dissemination, socialization and counseling, training and education, and early warning. The current form of disaster mitigation implemented in Gayamharjo Village is water drooping using tanks, utilizing springs, reforestation, drilling wells, water storage tanks, PAMSIMAS, and PDAM.*

*Keywords: Drought, Mitigation, Policy*

## A. Latar Belakang

Secara geologis, Indonesia terletak berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Ditambah lagi dengan julukan ring of fire, atau Lingkaran Api Pasifik. Hal tersebut menjadikan Indonesia sering mengalami bencana. Bencana yang sering terjadi yaitu banjir, gunung meletus karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah gunung aktif terbanyak di dunia, longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Salah satunya adalah bencana alam kekeringan, setiap tahunnya saat musim pancaroba atau kemarau datang di berbagai wilayah di Indonesia mengalami bencana alam kekeringan.

Bencana kekeringan terjadi karena adanya perubahan iklim. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). (Kecpengasih, 2019). Bencana kekeringan bukan permasalahan yang ringan, karena hal tersebut terkait dengan ketersediaan air, sedangkan air sudah menjadi kebutuhan manusia sehari-hari.

Bencana sendiri merupakan pengertian antroposentris, artinya suatu peristiwa tidak akan dikatakan menjadi sebuah bencana apabila tidak merugikan manusia. (Suwiji, 2019). PP No 21 Tahun 2008 pasal 20 ayat (1) baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara dan masyarakat. Dalam konteks bencana dikenal dua macam yaitu (1) bencana alam yang merupakan suatu serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam yaitu berupa gempa, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. (2) bencana sosial merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik, penyakit, dan teror. (Kuncoro, 2018).

Definisi kekeringan secara umum adalah kondisi dimana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekeringan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut Parwata *et al.* (2014) kekeringan merupakan hubungan antara ketersediaan air dibawah rata-rata minimal kebutuhan air hidup, lingkungan, maupun ekonomi. Bencana alam tidak dapat dicegah, bencana merupakan suatu musibah yang bisa datang kapan saja walaupun tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi bencana dapat di tanggulangi dan diminimalisirkan, mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Kekeringan bisa terjadi dimana saja. Di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Kapanewon Prambanan setiap tahunnya beberapa kalurahan di Kapanewon Prambanan mengalami kekeringan yang sangat parah. Kalurahan yang mengalami dampak kekeringan terparah adalah Sambirejo, Wukirharjo, Sumberharjo dan Gayamharjo. Kalurahan Gayamharjo terkenal dengan destinasi wisata religinya yaitu Goa Maria Sendang Sriningsih. Disamping itu, Kalurahan Gayamharjo selalu mengalami kekeringan setiap tahunnya. Kekeringan ini sudah turun temurun sejak zaman Belanda. Kalurahan Gayamharjo terdiri dari tujuh dusun dan beberapa dusun di Kalurahan Gayamharjo letak geografisnya dengan kondisi alam yang berupa bukit atau tegalan dan sering terjadi

kekeringan panjang yang menyebabkan sulitnya di jangkau oleh kendaraan yang berat karena medan terjal. Sehingga kebutuhan air bersih disana sulit untuk diatasi. Bencana alam kekeringan tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi berdampak juga pada hewan ternak, dan area persawahan milik petani juga ikut mengering sehingga kegagalan panen juga dapat terjadi. Pemerintah terus berupaya mencari solusi dalam permasalahan bencana alam kekeringan ini.

Selama pemerintah belum menurunkan bantuan air bersih kepada masyarakat, mereka memilih untuk membeli air bersih seperti membeli air per tangki atau membuat tampungan air hujan, tetapi intensitas hujan yang turun tidak rata di semua wilayah yang ada di Yogyakarta sehingga kawasan yang dilanda kekeringan masih membutuhkan bantuan air bersih dan jika turun hujan hanya di kawasan-kawasan tertentu itupun dengan durasi yang tidak lama. Sebagian warga di Kalurahan Gayamharjo yang tinggal di tempat yang strategis untuk mendapatkan air bersih, mereka lebih memilih untuk membuat sumur sendiri. Akan tetapi bagi warga desa yang bertempat tinggal di kawasan yang sulit mendapatkan air bersih mereka membuat tampungan air hujan sendiri. Di Kalurahan Gayamharjo terdiri dari beberapa dusun dan seluruh wilayahnya terkena dampak kekeringan yaitu dusun Jali, Gayam, Lemahabang, Nawung, Kalinongko Kidul, Kalinongko Lor, dan Jontro. Para pemangku kepentingan terus mencari solusi agar warganya mendapatkan air bersih dengan rata melalui program-program mitigasi kekeringan yang sudah ada saat ini di Kalurahan Gayamharjo.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kabupaten Sleman juga memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Kalurahan Gayamharjo juga turun tangan mengatasi persoalan kekeringan yang ada di wilayah tersebut melalui pos alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) APBDes, hal itu disebabkan setiap tahunnya beberapa wilayah di desa tersebut masih mengalami kekurangan air bersih. Langkah ini sesuai dengan ketentuan UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanahkan pemerintah desa untuk mengalokasikan BTT dalam hal penanganan kondisi darurat. Menindaklanjuti aturan perundangan itu, Pemkab Sleman kemudian menetapkan Peraturan Bupati Nomer 31 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Perbup itu menyebutkan bahwa pencairan BTT dapat dilakukan sepanjang telah mendapat rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Desa bisa mengeluarkan BTT dengan catatan mengantongi rekomendasi BPBD bahwa wilayahnya terdampak bencana. (Hapsari, 2019)

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **B.1 Tinjauan Mitigasi**

Mitigasi adalah tindakan berkelanjutan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang terhadap kehidupan dan properti dari bahaya. Singkatnya, mitigasi sendiri merupakan salah satu cara dalam menanggulangi bencana. Mitigasi merupakan suatu istilah yang

digunakan untuk merujuk pada setiap aksi untuk mengurangi dampak bencana, yang bisa dilakukan sebelum terjadinya bencana, termasuk kesiapsiagaan dan penyusunan rencana jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana (Coburn, Spence, & Pomonis, 1994).

Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat (DKP, 2004). Menurut UU RI No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah suatu tindakan atau serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. (Faizal Aco, 2019).

#### B.1.1 Jenis-Jenis Mitigasi

Mitigasi merupakan sebuah langkah yang diambil secara independen dari situasi darurat. (Puri & Khaerani). Coppola (dalam Kusumasari, 2014: 23) menjelaskan bahwa ada dua jenis mitigasi yaitu:

1. Mitigasi struktural, didefinisikan sebagai usaha pengurangan risiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan lingkungan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. Upaya ini mencakup ketahanan konstruksi, langkah-langkah pengaturan, dan kode bangunan, relokasi, modifikasi struktur, konstruksi tempat tinggal masyarakat, konstruksi pembatas atau sistem pendeteksi, modifikasi fisik, sistem pemulihan, dan penanggulangan infrastruktur untuk keselamatan hidup.
2. Mitigasi non struktural, meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi risiko melalui modifikasi

proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Di dalam teknik ini terdapat langkah-langkah regulasi, program pendidikan, dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik non struktural, modifikasi perilaku, serta pengendalian lingkungan.

#### B.1.2 Strategi Mitigasi Bencana

##### 1. Pemetaan

Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan.

##### 2. Pemantauan

Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.

##### 3. Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster dan *leaflet* kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia yang rawan bencana, tentang tata mengenali, mencegah dan penanganan bencana.

##### 4. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat

bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi.

#### 5. Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk.

#### 6. Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

### B.2 Tinjauan Kekeringan

Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. (Ma'arif, 2007). Bahaya kekeringan adalah dampak dari perubahan iklim global El Nino dan La Nina. El Nino sebagai penyimpangan iklim yang mengakibatkan kemarau panjang, sedangkan La Nina yang menyebabkan musim penghujan panjang. Keduanya merupakan fenomena alam yang bersifat normal dan selalu terulang pada pola tertentu (Kodoatie: 2011).

Kekeringan tidak dapat dielakkan dan secara perlahan berlangsung lama hingga

musim hujan tiba. Berdasarkan penyebabnya, bahaya kekeringan termasuk kedalam kategori bahaya yang disebabkan oleh alam. Karakteristik bahaya kekeringan cukup berbeda dari bahaya yang lain, karena datangnya yang tidak tiba-tiba namun timbul secara perlahan dan mudah diabaikan. Dampaknya akan terasa ketika lahan-lahan produktif seperti pertanian tiba-tiba mengalami kegagalan panen maupun penurunan kualitas. Akibat yang lebih ekstrim lagi adalah rusaknya sistem tanah yang berujung tidak termanfaatkannya guna lahan yang optimal, kelaparan, dan rusaknya sistem sektor pertanian. peristiwa langka atau sulitnya menemukan keberadaan air di suatu daerah pada waktu tertentu.

### B.3 Tinjauan Kebijakan

Kebijakan publik yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers*. Untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. (Ibty, 2019)

### B.4 Tinjauan Kelurahan/Desa

#### B.4.1 Definisi Kelurahan/Desa

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020, kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologi kata kelurahan/desa berasal dari Bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Noor dan Faizal Aco, 2019)

## **C. Metodologi Penelitian**

### **C.1 Metode**

Metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Metode berfungsi sebagai alat

untuk mencapai suatu tujuan, atau bagaimana cara untuk melakukan/ membuat sesuatu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dan dianggap mampu menerangkan fenomena atau gejala dengan lebih menyeluruh (Rahmat, 2009).

### **C.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dan satu variabel.

### **C.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### **C.3.1 Teknik Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek dan detail guna menemukan informasi mengenai objek tersebut. Menurut Patton (dalam Poerwandari, 1998) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian yang diamati. Pada penelitian ini,

peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data tentang bentuk mitigasi bencana kekeringan di Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### C.3.2 Teknik Wawancara

Menurut (Moleong, 2005: 186) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini, metode wawancara mendalam dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk kelancaran melakukan wawancara, peneliti menyusun panduan wawancara penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan mencatat informasi menyangkut tentang mitigasi, strategi, dan kebijakan pemerintah desa dalam menghadapi kekeringan.

### C.3.3 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian yaitu dengan cara mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip, dan lainnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tektik dokumentasi untuk memperkuat data pada penelitian ini. bentuk dokumentasi berupa foto, tulisan, grafik yang berhubungan dengan penelitian.

## D. Hasil dan Pembahasan

### D.1 Strategi Mitigasi Bencana Kekeringan

#### D.1.1 Identifikasi Pemetaan Wilayah Kalurahan Gayamharjo.

Setiap tahunnya di Kapanewon Prambanan terdampak kekeringan saat musim kemarau tiba. Terdapat 4 desa di Kapanewon Prambanan yang selalu mengalami kekeringan setiap tahunnya yaitu di Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Sambirejo, dan Kalurahan Wukirharjo. Salah satunya yaitu di Kalurahan Gayamharjo yang juga terkena dampak kekeringan dan kekurangan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalurahan Gayamharjo memiliki 7 (tujuh) dusun dan seluruh dusun terkena dampak kekeringan dan kekurangan air bersih setiap tahunnya. Jika dilihat dari kondisi geografis, pada saat musim kemarau Kalurahan Gayamharjo juga sangat rentan terhadap kebakaran, dan saat musim penghujan rawan longsor karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari perbukitan dan tegalan sehingga daerah tersebut sulit dijangkau dengan kendaraan berat. Informasi yang di dapat dari hasil wawancara dengan lurah Gayamharjo Bapak Parwoko, S.T seperti berikut:

*“Jadi di Kalurahan Gayamharjo setiap tahunnya mengalami kekeringan, dan hampir seluruh wilayah di Kalurahan Gayamharjo mengalami krisis air bersih. Ada 7 dusun di Kalurahan Gayamharjo dan semua dusun tersebut terkena dampak kekeringan.”*

#### D.1.2 Pemantauan Wilayah Kalurahan Gayamharjo yang Terkena Dampak Kekeringan

Pemantauan adalah proses pengamatan suatu peristiwa atau kejadian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang selanjutnya akan dilakukan tindakan.



Pemantauan sangat penting dilakukan terlebih lagi daerah tersebut merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Informasi yang didapat oleh Bapak Lurah Parwoko S.T melalui wawancara yang dilakukan tanggal 20 Januari 2021 mengenai pemantauan atau pengamatan yang dilakukan oleh Kalurahan Gayamharjo terkait dengan wilayah-wilayah yang berada di Kalurahan Gayamharjo yang terkena dampak kekeringan yaitu:

*“Sebelum akhir tahun 2020, seluruh wilayah-wilayah atau dusun-dusun yang berada di Kalurahan Gayamharjo mengalami kekeringan setiap tahunnya, dan dampaknya menyebabkan warga desa kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, kita tahu bahwa dilihat dari kondisi atau letak geografis, ada beberapa wilayah yang berupa perbukitan atau tegalan, sehingga pemerintah kalurahan membuat cara-cara yang berbeda dalam mengatasi kekeringan. Selain itu, kita juga memiliki kepala dusun yang dapat membantu kita memantau di masing-masing dusun untuk ikut melaksanakan pemantauan mengenai wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan.”*

#### **D.1.3 Penyebaran Informasi dalam Mengatasi Kekeringan di Kalurahan Gayamharjo**

Penyebaran informasi sangat penting dalam proses mitigasi bencana, karena proses penyampaian informasi mengenai bencana sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu. Dalam hal penyebaran informasi mengenai kekeringan di Kalurahan Gayamharjo, pemerintah kalurahan menerima keluhan-keluhan dari warga desa bahwa warga sudah sangat kekurangan air.

Setelah mendapat keluhan-keluhan dari warga lalu pemerintah kalurahan turun tangan mencari solusi dan mengirimkan bantuan. Hal ini di sampaikan oleh Lurah Gayamharjo Bapak Parwoko pada wawancara yang dilakukan tanggal 20 Januari 2021:

*“Pemerintah kalurahan mendapat keluhan-keluhan dari masyarakat desa Gayamharjo mengenai kekurangan air. Jadi tidak ada penyebaran informasi yang spesifik untuk mengatasi kekeringan di desa Gayamharjo.”*

#### **D.1.4 Sosialisasi dan Penyuluhan dalam Mengatasi Kekeringan**

Sosialisasi adalah kegiatan untuk memperkenalkan suatu hal kepada publik. Penyuluhan adalah suatu proses atau cara memberi petunjuk terhadap suatu hal. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Gayamharjo yaitu dengan mengajak warga setempat menanam tanaman konservasi. Pemerintah kalurahan melakukan sosialisasi kepada warga setempat Gayamharjo agar menanam tanaman konservasi seperti tanaman indigovera, ringin, dan gayam. Pemerintah kalurahan mempunyai program menggiatkan warga desa untuk menanam tanaman konservasi tersebut karena tanaman tersebut mempunyai fungsi dan manfaat yang baik dalam kemampuannya menyerap dan menyimpan air. Hal ini tentu dapat mengurangi dampak kekeringan di Kalurahan Gayamharjo. Selain itu, dari pihak PDAM juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan Gayamharjo terkait tata cara menjadi pelanggan dan terkait retribusi yang harus dibayarkan. Hal ini disampaikan oleh Lurah Gayamharjo pada wawancara yang dilakukan pada 20 Januari 2021:

*“Sosialisasi yang dilakukan mengenai kekeringan di Kalurahan Gayamharjo berupa memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada warga kalurahan mengenai manfaat menanam tumbuhan konservasi, lalu juga ada penyuluhan tentang program penyediaan air bersih seperti PAMSIMAS, PDAM dan lain-lain”*

#### **D.1.5 Pelatihan dan Pendidikan**

Pemerintah kalurahan memberikan pengetahuan kepada warga kalurahan tentang pentingnya melakukan penanaman tanaman konservasi. Karena di Kalurahan Gayamharjo sebagian besar ditanami pohon jati dan warga masih belum menyadari manfaat tanaman konservasi. Pemerintah kalurahan juga memberikan suatu himbauan kepada warga mengenai penggunaan air yang tidak berlebihan pada masa krisis air. Hal ini disampaikan pada wawancara yang dilakukan pada 20 Januari 2021 oleh Lurah Gayamharjo Bapak Parwoko:

*“Kita memberikan pengetahuan tentang manfaat menanam tanaman konservasi, karena tanaman tersebut dapat menyimpan air dengan baik otomatis warga harus berinisiatif untuk berjaga-jaga saat musim kemarau nanti bagaimana caranya supaya tidak kekurangan air, dan tidak harus mengandalkan bantuan dari pemerintah terus-menerus”*

#### **D.1.6 Peringatan Dini**

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan memberitahukan kepada masyarakat akan terjadinya suatu kejadian alam atau bencana yang akan terjadi. Tidak ada sistem peringatan dini yang spesifik atau khusus dalam mengatasi kekeringan di Kalurahan

Gayamharjo. Karena tiap tahunnya Kalurahan Gayamharjo dan beberapa kalurahan di Kapanewon Prambanan mengalami kekeringan. Pemerintah kalurahan setiap tahunnya memberikan sosialisasi kepada warga dalam menghadapi kekeringan. Peringatan kekeringan yang diberikan oleh Kalurahan Gayamharjo biasanya berbentuk seperti pemasangan baliho atau banner. Hal ini disampaikan oleh Lurah Gayamharjo pada wawancara yang dilakukan tanggal 20 Januari 2021:

*“Tidak ada sistem peringatan yang spesifik pada permasalahan kekeringan di Kalurahan Gayamharjo, karena memang disini setiap tahunnya mengalami kekeringan saat musim kemarau tiba. Biasanya ada pemasangan banner atau baliho mengenai kekeringan yang nantinya akan berujung pada kebakaran, dan itu dipasang hanya di titik tertentu yang rawan kebakaran. Biasanya dari kepolisian setempat yang memasang.”*

### **D.2 Bentuk-Bentuk Mitigasi Kekeringan Di Kalurahan Gayamharjo**

#### **D.2.1 Operasional Pemeliharaan dan Pengelolaan Air (OPPA)**

Untuk mengatasi atau menanggulangi kekeringan di desa Gayamharjo, pada tahun 2005 telah dibentuk OPPA (Operasional Pemeliharaan dan Pengelolaan Air) dengan Surat Keputusan Camat Prambanan. OPPA dibuat untuk membantu menyukupi kebutuhan air bersih di beberapa kalurahan yang ada di Kapanewon Prambanan yang terkena kekeringan seperti Kalurahan Sumberharjo, Gayamharjo, Wukirharjo, dan lokasi lainnya yang berada diatas perbukitan yang kerap mengalami krisis air bersih. Namun seiring waktu belasan tahun yang telah berjalan,

kemampuan pompa dan jaringan saat ini mengalami penurunan dengan debit air yang bocor lebih dari 50 %. Biaya perbaikan yang dikeluarkan setiap bulan mencapai Rp. 10.000.000 s/d Rp. 20.000.000. Karena pompa sering bermasalah akibatnya masyarakat sulit mendapatkan akses ke air bersih. Sejak tahun 2018 OPPA ditutup dan sudah tidak lagi beroperasi dikarenakan terjadinya konflik antar warga desa padahal jaringan OPPA mengalir ke semua dusun-dusun yang ada di Kalurahan Gayamharjo. Hal tersebut di sampaikan oleh Lurah Gayamharjo dalam wawancara yang di lakukan pada tanggal 20 Januari 2021:

*“Dulu wilayah Gayamharjo memakai OPPA yang ada di Kalurahan Sambirejo, itu yang pakai oleh kalurahan-kalurahan yang ada di Kapanewon Prambanan tetapi sekarang sudah ditutup karena sering rusak dan ada konflik.”*

### **D.2.2 Drooping Air Menggunakan Tangki**

*Drooping* air merupakan program bantuan dari pemerintah. Kabupaten Sleman yang memberikan pasokan-pasokan air ke warga-warga kalurahan yang mengalami kesulitan air. Bantuan *drooping* air melalui tangki di Kalurahan Gayamharjo rutin dilakukan 1-2 minggu saat musim kemarau. Bantuan ini setiap tahunnya selalu ada dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan seperti ini dirasa sangat membantu beban masyarakat atas kebutuhan air bersih. Masyarakat sangat terbantu sekali jika ada bantuan seperti ini, karena ketimbang membeli tangki yang harganya terbilang cukup mahal sekitar Rp. 150.000 – Rp. 200.000 pertangki. Hal ini disampaikan saat

wawancara dengan Bapak Edy Carik Gayamharjo pada 28 Januari 2021:

*“Setiap tahun kita mendapat bantuan drooping air dari berbagai pihak, ada dari Pemda Sleman, donatur, bantuan-bantuan organisasi. Karena setiap tahun saat musim kemarau pasti disini selalu mengalami krisis air bersih, banyak warga yang mengeluh. Tapi banyak warga yang beli air pertangki dengan harga yang cukup mahal, tapi Namanya air itu kebutuhan mau tidak mau ya harus di dapatkan.”*

### **D.2.3 PAMSIMAS**

Kepanjangan dari PAMSIMAS adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. PAMSIMAS adalah salah satu program pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia. Program PAMSIMAS dilaksanakan di daerah perdesaan dan pinggiran kota. PAMSIMAS merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

#### **D.2.4 Sumur Bor**

Sumur bor merupakan salah satu program pemerintah kalurahan untuk mengatasi kekeringan di Kalurahan Gayamharjo. Sumur bor adalah salah satu proses penggalian tanah yang dilakukan agar bias mendapatkan sumber mata air yang berada di dalam tanah. Terdapat 2 sumur bor di Kalurahan Gayamharjo, kedua sumur bor tersebut terdapat di dusun Kalinongko Lor dan dusun Jontro. Sumur bor yang terdapat di dusun Jontro dibuat tahun 2005 yang berasal dari Disperindagkop Bidang Pertambangan dan Energi Provinsi DIY, pembuatannya menggunakan dana APBD tetapi sumur bor tersebut hanya dipakai oleh 2 dusun saja yaitu dusun Jontro dan dusun Kalinongko Lor. Sedangkan sumur bor yang terdapat di dusun Kalinongko Lor dibuat pada tahun 2019, pada saat itu warga kalurahan mengalami kekeringan terparah dan pemerintah kalurahan mengeluarkan kebijakan Perdes No 3 tahun 2019 tentang Pembangunan atau Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa, pembuatan sumur bor tersebut menggunakan anggaran APBDes yaitu 180 juta untuk pembuatan sumur bor. Kedua sumur bor tersebut hanya dipakai di dua dusun saja yaitu dusun Kalinongko Lor dan dusun Jontro.

#### **D.2.5 Bak Penampungan Air**

Bak penampungan air merupakan salah satu program pemerintah kalurahan dalam mengatasi kekeringan di Kalurahan Gayamharjo. Pemerintah kalurahan mengeluarkan Perdes No 3 Tahun 2019 tentang Pembangunan atau Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan mengeluarkan anggaran 80 juta untuk membuat bak penampungan air yang tersebar

di wilayah Kalurahan Gayamharjo di beberapa titik tertentu. Hal ini disampaikan dalam wawancara pada 28 Januari 2021 dengan Carik Kalurahan Gayamharjo Bapak Edy:

*“Kita ada program bak penampungan yang terpasang di titik-titik tertentu di hampir setiap dusun yang ada di Kalurahan Gayamharjo. Program ini menggunakan dana APBDes. Bak penampung air ini dipakai bersamaan tidak untuk satu rumah saja, tetapi untuk beberapa rumah.”*

### **E. Penutup**

#### **E.1 Kesimpulan**

- a. Strategi Mitigasi Kekeringan yang terdapat di Kalurahan Gayamharjo yaitu dengan melakukan pemetaan wilayah, pemantauan wilayah, penyebaran informasi, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, mengadakan pelatihan dan Pendidikan terkait dengan mitigasi bencana, peringatan dini.
- b. Dengan adanya bentuk mitigasi kekeringan seperti drooping air, PAMSIMAS, sumur bor, bak penampungan air, pemanfaatan sumber mata air, reboisasi dan PDAM yang terdapat pada setiap dusun di Kalurahan Gayamharjo, maka hal tersebut membantu mengurangi dampak kekeringan yang mengakibatkan warga mengalami krisis air bersih.

#### **E.2 Saran**

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar bisa menambahkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (*Non Governmental Organization*) sebagai informan di luar non pemerintah agar bisa

mengkritisi atau menambahkan saran sumbangsih terkait dengan apa saja yang masih bisa dilakukan untuk selalu berjalan dengan baik terhadap program mitigasi kekeringan di Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik Edisi 2*.
- Adi, H. P. (2011). Kondisi dan Konsep Penanggulangan Bencana Kekeringan di Jawa Tengah.
- Dwi Hastuti, Sarwono, Chatarina Muryani. (2017, Januari). Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bahaya Kekeringan Kabupaten Grobogan. *Jurnal GeoEco*, 45-57.
- Faizal Aco (2019, Desember). Mitigasi Bencana Berbasis Dana Desa Dalam Menghadapi Bahaya Tebing Rawan Sepanjang Pantai di Gunung Kidul. *Jurnal Enersia Publika*, Hal 139-155.
- Faizal Aco (2018, Desember). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat. *Jurnal Enersia Publika*, Hal 67-86.
- Fadhli, A. (2019). *Mitigasi Bencana*.
- Hapsari, A. (2019). *Gayamharjo Usulkan Status Darurat Kekeringan*.
- Henti, Faizal Aco, Idham Ibtly (2020, Desember). Hubungan Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana “Studi Kasus Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta” *Jurnal Enersia Publika*, Hal 197-211.
- Ibty, M. R. (2019, Desember). Implementasi Kebijakan Dana Desa tahun 2016 di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. *Jurnal Enersia Publika*, 3, 113-125.
- Kansil, C. S. (2004). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kecpengasih. (2019, September). Status Tanggap Darurat Kekeringan Ditetapkan Kulon Progo. Retrieved from <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/890/status-tanggap-darurat-kekeringan-di-tetapkan-kulon-progo>
- Kuncoro, D. A. (2018, Oktober). Perlunya Pendidikan Mitigasi Bencana untuk Masyarakat. Retrieved from <http://bbrvbd.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=195>
- Ma'arif, S. (2007). *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. (W. R. Sugeng, Ed.) Jakarta Pusat: Direktorat Mitigasi Lakhar BAKORNAS PB.
- Noor Widayati, Faizal Aco (2019, Desember). Pemanfaatan Dana Desa (DD) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publika*, Hal 156-175.

Puri, D. D., & Khaerani, T. R. (n.d.). Strategi Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo.

Silahuddin, M. (2015). *Kewenanga Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sutopo, H. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*.

Suwiji, N. S. (2019, Juni 18). Kekeringan : Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Penanggulangan. Retrieved from <https://foresteract.com/kekeringan/>

#### **INTERNET**

<https://birotapem.jogjaprov.go.id/hukum/PERDA-DIY-NO2-TAHUN-2020-TTG-Pedoman-Pemerintahan-Kalurahan.pdf>